

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian diantaranya:

1. Jurnal penelitian oleh **Muhammad Rivaldy Anshory dkk** (2020) Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
Berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Baru Kecamatan Tenggarong”** Saat ini sampah menjadi persoalan serius terutama bagi daerah perkotaan sebagai daerah dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan jumlah konsentrasi sampah yang besar. Terdapat Peraturan yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Khusus dalam pengelolaan sampah, sampai saat ini peran serta masyarakat secara umum hanya sebatas pembuangan saja, belum sampai pada tahap pengelolaan yang dapat bermanfaat kembali. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah masih rendah, masyarakat belum menganggap sampah sebagai suatu sumber daya, masyarakat belum terinformasikan tentang berbagai peraturan atau pedoman dalam pengelolaan sampah, pemerintah cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek dalam pembangunan sehingga pemerintah kurang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Sebaiknya pemerintah menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam

pembangunan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di kelurahan baru kecamatan tenggarong. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan model penelitian asosiatif, yaitu ingin melihat hubungan antara dua variabel yaitu variabel partisipasi masyarakat dan pengelolaan sampah. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t persamaan regresi variabel independen terhadap variabel dependen diperoleh hubungan yang positif di antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan hasil perhitungan uji t dapat diketahui secara jelas bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka hasilnya adalah H_0 ditolak dengan demikian Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Sampah diterima.

2. **Ika Puja Ningrum** (2024) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Perubahan Perilaku Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Putri Mandiri Di Desa Wonorejo Sragen Jawa Tengah”** Sampah merupakan masalah yang terjadi pada setiap daerah tak terkecuali permasalahan sampah yang terjadi di Desa Wonorejo Sragen Jawa Tengah. Untuk itu masyarakat Wonorejo mendirikan bank sampah Putri Mandiri sebagai bentuk penanggulangan sampah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas pada partisipasi masyarakat yang terjadi di dalamnya meliputi partisipasi tenaga, harta benda maupun buah pikiran. Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian untuk melihat pengaruh partisipasi masyarakat bank

sampah terhadap perubahan perilaku pengelolaan sampah di Desa Wonorejo Sragen Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat atau nasabah bank sampah berpengaruh terhadap perubahan perilaku pengelolaan sampah di Desa Wonorejo Sragen Jawa Tengah. Selain itu juga untuk mengetahui jumlah besaran pengaruhnya. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner baik secara langsung maupun tidak langsung (online) yang disebar melalui perkumpulan PKK nasabah bank sampah dan whatsapp dalam bentuk google form kepada 78 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu uji Spearman Rho dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 for windows. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pertama, menurut hasil uji hipotesis menggunakan korelasi Spearman Rho seluruh hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima dengan nilai signifikansi 0,000 yang berarti $0,000 < 0,05$. Kedua terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap perubahan perilaku pengelolaan sampah di Desa Wonorejo Sragen yang diperoleh oleh peneliti adalah 64,7%. Dilihat dari nilai koefisien korelasi yang berarti berpengaruh positif. Ketiga, pada indikator partisipasi masyarakat bank sampah yang paling berpengaruh terhadap perubahan perilaku pengelolaan sampah ialah indikator tanggung jawab masyarakat sebesar 64,3% dengan rincian 55 responden sangat setuju, 22 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.

B. Teoritis

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Definisi partisipasi, dalam kerangka kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan keikutsertaan peran serta. Dalam penggunaan umum, istilah partisipasi sering kali diartikan secara sederhana sebagai tindakan mengambil bagian dalam suatu aktivitas (Kelly dalam Jussac Maulana Masjhoer 2025:27). Kendati demikian, perlu dipahami bahwa partisipasi merupakan konsep multidimensional dan kaya interpretasi. Keragaman definisi ini berakar pada perbedaan ideologis yang mendasari pemahaman terhadap konsep tersebut, yang menghasilkan makna serta penerapan yang berbeda (Claridge dalam Jussac Maulana Masjhoer 2025:27).

Menurut Kelly dalam Jussac Maulana Masjhoer (2025:28), partisipasi adalah serangkaian proses di mana masyarakat lokal terlibat dan berperan dalam isu-isu yang mempengaruhi mereka. Partisipasi menjelaskan cara warga menjalankan pengaruh dan kendali atas keputusan yang mempengaruhi mereka. Masyarakat yang berpartisipasi akan berkontribusi melalui perhatian, kebutuhan, minat, dan nilai yang dimasukkan ke dalam keputusan dan tindakan.

Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan langsung dari masyarakat yang berkontribusi pada kegiatan, proses, dan hasil kelompok dalam lokalitas tertentu. Definisi partisipasi mengisyaratkan kontinum partisipasi dan berbagai tingkat keterlibatan masyarakat. Namun demikian, partisipasi bersifat sukarela dan masyarakat dapat memilih seberapa jauh keikutsertaannya atau bahkan mengundurkan

diri sewaktu-waktu (goodson and phillimore dalam jussac maulana masjhoer, 2025:28).

Partisipasi menurut effendi dalam simon sumanjoyo hutagalung (2022: 10), bentuk partisipasi terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program lainnya, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Siswanto dalam Bakry Usman (2025:61) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental, pikiran, moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam pembangunan kemandirian dalam proses pemandirian. Menurut Sugandi (dalam Suaib, 2023:53) Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan perkembangan yang berpusat pada masyarakat, Partisipasi menurut Hoofstede yang dikutip Suaib (2023:58) bahwa partisipasi adalah “ *The taking part in one or more phases* ” atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses.

Dalam hal ini adalah dalam proses pembangunan. Oleh karena itu partisipasi adalah pokok utama dalam proses pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan masyarakat secara langsung dan hanya mungkin dapat dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak dari awal, proses

dan perumusan hasil, keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian untuk menciptakan partisipasi yang dinamis atas prakarsa dan kemauan masyarakat diperlukan sosialisasi, pengembangan pendidikan politik sebagai suatu bentuk penciptaan pra kondisi yang dapat mendukung terjadinya partisipasi masyarakat.

Keragaman arti partisipasi ini pada hakikatnya terkait erat dengan kepentingan dan agenda yang beragam pula dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis. Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin. Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program.

Oleh karena itu, konsep partisipasi merupakan suatu konsep yang luas, dan penting, karena salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan hak asasi manusia. Dengan kata lain,

partisipasi dalam suatu kebijakan publik selalu berkaitan dengan masyarakat sebagai objek yang dituju dari suatu kebijakan, karena secara esensial kebijakan itu dilahirkan dalam kerangka dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat.

Di sisi lain cohen & uphoff dalam jussac maulana masjhoer (2025:30) mengembangkan kerangka kerja yang lebih deskriptif dan analitis untuk memahami berbagai jenis dan tingkatan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan pedesaan. Model ini lebih deskriptif dan pragmatis, menekankan pentingnya partisipasi aktif dan interaktif untuk keberhasilan dan keberlanjutan proyek pembangunan. Teori tahapan partisipasi mengidentifikasi empat jenis partisipasi berdasarkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam siklus sebuah proyek, yaitu:

- 1) Pengambilan keputusan (decision-making). Pengambilan keputusan berkaitan dengan memunculkan gagasan, pilihan metode, dan menentukan pilihan yang tepat bagi kepentingan masyarakat. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini yaitu hadir dalam forum diskusi dan menyumbangkan pemikiran, tanggapan, maupun penolakan terhadap suatu program.
- 2) Pelaksanaan (implementation). Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program dengan tiga bentuk. Pertama yaitu berkontribusi dalam berbagai bentuk seperti pendanaan, tenaga, barang, dan informasi. Kedua, masyarakat dapat terlibat dalam administrasi dan koordinasi program. Ketiga, bentuk partisipasi

pelaksanaan yang paling umum adalah melalui pendaftaran dalam program.

- 3) Manfaat (benefits). Partisipasi dalam pengambilan manfaat merupakan hasil dari pelaksanaan yang dinilai dari sisi kualitas maupun kuantitas. Tiga jenis manfaat yang dapat dirasakan yaitu secara materi, sosial, dan personal. Manfaat hasil program tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.
- 4) Evaluasi (evaluation). Evaluasi ini berhubungan dengan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Bentuk partisipasi ini untuk mengetahui pencapaian program dan mencari solusi dalam perbaikan maupun peningkatan kinerja program. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini dapat berupa pengawasan langsung, pemberian saran, kritikan atau protes.

Dikutip dari Jussac Maulana Masjhoer (2025:31), teori partisipasi Cohen & Uphoff dirasa lebih aplikatif dalam perencanaan dan manajemen proyek pembangunan. Oleh karena itu, penerapan teori tahapan partisipasi akan lebih relevan bila digunakan untuk studi yang meneliti partisipasi masyarakat perdesaan dalam pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan konteks partisipasi di tengah masyarakat perdesaan perlu melihat konsep keseluruhan dengan melihat komponen yang lebih spesifik dan lebih konkret. Selain itu, penerapan teori tahapan partisipasi Cohen & Uphoff dapat membantu merancang strategi partisipasi yang

sesuai sertamengevaluasiefektivitaspartisipasidalam mencapaitujuan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat sejak dari adanya pendekatan hingga pada pendekatan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya (Arnstein dalam Adiliswanto 2024:12). Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan secara langsung dimana masyarakat, baik individu atau bahkan melalui suatu kelompok organisasi dapat bertukar informasi, mengekspresikan pendapat dan kepentingan, serta mempunyai potensi yang dapat mempengaruhi suatu keputusan atau hasil secara spesifik.

Partisipasi masyarakat adalah sebagai bagian dalam kegiatan bersama (Ndraha dalam kutipan Dindin Abidin 2023:20), sedangkan menurut Mubiyarto dalam kutipan Dindin Abidin (2023:20) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu menghasilkan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri.

Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang mungkin membawakewenangan yang oleh Haller dalam Adrian Tawai (2017:13) digambarkan sebagai proses individu ambil bagian dalam pembuatan keputusan terhadap suatu lembaga, program dan lingkungan yang mempengaruhinya.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan

potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi melibatkan lebih banyak mental dan emosi daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat daripada fisiknya sendiri. Partisipasi yang didorong oleh mental dan emosi yang demikian itu, disebut sebagai partisipasi sukarela. Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab dalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung jawab kepada organisasi.

Sementara itu, menurut Chapin dikutip Suaib (2023:61) mengemukakan adanya bentuk partisipasi masyarakat, antara lain:

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- b. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- c. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
- d. Partisipasi representatif, partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

c. Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tidak dapat muncul dari spontanitas. Dorongan untuk berpartisipasi muncul dari interaksi kompleks faktor internal dan faktor eksternal. Pemahaman mendalam akan kedua jenis faktor ini penting dilakukan untuk merancang strategi peningkatan partisipasi yang efektif dan berkelanjutan. Faktor internal merupakan kekuatan pendorong yang berakar dalam diri individu. Karakteristik sosio-demografi, seperti usia, tingkat pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, pekerjaan, dan status sosial, memainkan peran penting dalam membentuk kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi. Misalnya, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu lingkungan dan pentingnya partisipasi. Kesadaran lingkungan yang tinggi, yang tumbuh dari pemahaman akan dampak negatif kerusakan lingkungan dan manfaat dari tindakan pelestarian, menjadi motivasi intrinsik yang kuat untuk terlibat dalam program-program lingkungan.

Pengetahuan yang memadai tentang isu yang dihadapi, solusi yang tersedia, dan peran yang dapat dimainkan individu juga menjadi prasyarat penting untuk partisipasi yang efektif. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat mungkin merasa tidak yakin atau tidak mampu untuk berkontribusi secara berarti. Sebagai contoh, warga yang memahami bahaya sampah plastik bagi ekosistem laut dan kesehatan manusia, serta

mengetahui cara memilah sampah yang benar, akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program daur ulang sampah.

Disisilain, faktoreksternaladalah elemen-elemen pendorong yang berasal dari lingkungan di luar individu, yang dapat memengaruhi keputusan dan perilaku partisipasi. Insentif ekonomi, seperti imbalan finansial atau manfaat ekonomi langsung dari partisipasi (misalnya, program bank sampah yang memberikan pendapatan dari penjualan sampah daur ulang, atau insentif pajak bagi rumah tangga yang aktif mengompos sampah organik), dapat menjadi daya tarik kuat untuk meningkatkan partisipasi, terutama bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, seperti infrastruktur pengelolaan sampah yang mudah diakses (tempat sampah terpilah yang tersedia di ruang publik, jadwal pengangkutan sampah yang teratur), informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang program partisipasi, serta dukungan teknis dan pelatihan, dapat mempermudah dan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif.

Peran tokoh masyarakat, pemimpin agama, atau figur publik yang dihormati dan memiliki pengaruh kuat di komunitas juga sangat signifikan. Ajakan, contoh perilaku positif, dan dukungan terbuka dari tokoh-tokoh ini dapat memobilisasi dan menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas. Sebagai contoh, ketika seorang tokoh agama terkemuka di desa secara aktif mempromosikan program kebersihan lingkungan. Dan mengajak jamaahnya untuk berpartisipasi,

hal ini dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan kampanye informasi yang dilakukan pemerintah daerah saja.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing faktor pendorong partisipasi masyarakat yang dikutip dari Jussac Maulana Masjhoer (2025: 32-43):

1) KesadaranLingkungan

Kesadaran lingkungan mengacu pada informasi yang dimiliki seseorang tentang fenomena terkait lingkungan mereka, kepedulian mereka terhadap lingkungan, dan kesediaan mereka untuk bertindak demi lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kesadaranlingkunganyaitupengalamanpribadikontakdenganalam selama masa kanak-kanak, disposisi pendidik, dan menyaksikan pencemaran lingkungan (Kiessling et al., 2017). Seseorang yang ‘terputushubungandenganalam’karenatinggaldilingkunganyang tidak memungkinkan interaksi dengan alam merupakan penyebab kurangnya minat terhadap konservasi keanekaragaman hayati (Miller, 2005). Pengalaman yang dirasakan oleh seseorang akan dampak negatif ketika terjadi kerusakan lingkungan akan memunculkan rasa kesadaran lingkungan, terutama dalam pengelolaansampah.Kesadaranpublikdanmanfaatyangdirasakan memiliki dampak positif yang menonjol terhadap sistem pengelolaan sampah yang diterapkan (Yuan et al., 2019). Menurut Cudjoe et al. (2020).

2) Pengetahuan

Pengetahuan adalah keakraban, kesadaran atau pemahaman suatu komunitas, seperti fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan terhadap topik yang diminati, yang diperoleh melalui pengalamanataupendidikandenganmemersepsi,menemukan,atau belajar (Babaei et al., 2015). Pandebesie et al. (2019) menyorot pentingnya pengetahuan sebagai pendorong seseorang untuk berpartisipasi. Seseorang dengan pengetahuan terkait suatu bidang akan mendorong kesediaan untuk terlibat dalam suatu program. Masyarakat di Hongkong bersedia membayar pengelolaan sampah karena mereka telah mengetahui kondisi persampahan dilingkungannya(YeungandChung,2018).Sebaliknya,rendahnya pengetahuan lingkungan dan minimnya kampanye kesadaran lingkungan menjadi penyebab rendahnya praktik (Suma et al., 2019). Kurangnya kesadaran dan perilaku pro lingkungan dari masyarakat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan lingkungan. Olehkarenaitu,pendidikanlingkunganmerupakansolusimendasar untuk meningkatkan pemisahan sumber sampah di rumah tangga (Chen et al., 2017).

3) Insentif Ekonom

Merujuk pada KBBI Online, maka insentif ekonomi yaitu tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sebagainya, yang diberikan kepada seseorang untuk meningkatkan gairah kerja. Hal ini dapat diartikan bahwa salah satu penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu dikarenakan adanya insentif. Insentif ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk mau terlibat dalam suatu program pemerintah. Menurut Knickmeyer (2020), stimulus ekonomi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh sosial terhadap perilaku daur ulang, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Selain daya tarik penghargaan itu sendiri, insentif ekonomi juga meningkatkan kepercayaan diri penerima (Xu et al., 2018). Sistem insentif terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendaur ulang sampahnya (Ling et al., 2021). Di Shanghai, program daur ulang berbasis insentif menunjukkan kesuksesan yang besar. Jumlah rata-rata daur ulang yang dikumpulkan meningkat 190,9% sejak kebijakan daur ulang berbasis insentif diluncurkan di Shanghai (Yang et al., 2022). Keefektifan insentif ekonomi ditentukan oleh integrasi kontekstual sosial dengan rancangan program insentif dalam mendorong pemilahan sampah.

4) Tokoh Masyarakat

UU No.9 Tahun 2010 tentang keprotokolan menyebutkan tokoh masyarakat tertentu merupakan salah satu kedudukan yang dihormati sesuai dengan dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa. Tokoh masyarakat dipilih karena kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki oleh penduduk biasa. Kelebihan tersebut seperti kelebihan kemampuan intelektual, spiritual, dan komunikasi. Berdasarkan kelebihan yang dimiliki, maka bentuk kepemimpinan tokoh masyarakat akan berbeda-beda secara kontekstual. Bentuk kepemimpinan tokoh masyarakat yang umum ditemukan di tengah masyarakat yaitu pemimpin formal, pemimpin keagamaan, dan pemimpin budaya. Pengaruh tokoh masyarakat di suatu daerah, memiliki hubungan erat dengan pengembangan potensi di suatu daerah. Efektivitas tokoh masyarakat dapat terlihat dari sejauh mana ketokohnya mempengaruhi perubahan di suatu daerah. Hal ini dikarenakan ketokohan seseorang berguna dalam upaya memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Oleh karena itu, tokoh masyarakat minimal memiliki kemampuan dalam memotivasi, memfasilitasi, dan memobilisasi masyarakat.

5) Fasilitas pendukung

Fasilitas adalah sarana berupa benda atau alat untuk melancarkan dan memberikan kemudahan pelaksanaan suatu fungsi. Sifatnya yang memperlancar dan mempermudah suatu aktivitas, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu variabel pendorong partisipasi masyarakat dalam suatu program. Pengurangan sampah dalam skala rumah tangga diawali dengan

aktivitas pemilahan sampah sehingga kebutuhan akan tempat sampah terpisah menjadi penting. Selanjutnya pengangkutan sampah yang dilakukan oleh truk pengangkut juga harus memiliki bak yang disesuaikan dengan jenis sampah. Kesesuaian fasilitas persampahan yang mendukung aktivitas pengurangan sampah di rumah tangga akan memberikan kepastian bahwa masyarakat telah melakukan hal yang tidak sia-sia.

6) Karakteristik Sosio-demografi

Sosio-demografi merupakan gabungan dua kata yaitu sosial dan demografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial bermakna berkenaan dengan masyarakat atau kajian yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan demografi adalah ilmu yang memberikan gambaran tentang jumlah, persebaran, dan struktur penduduk yang terus bergerak dinamis karena kelahiran, kematian dan migrasi. Karakteristik sosio-demografi seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan acap kali dimasukkan dalam model penelitian karena ditemukan mempengaruhi perilaku pro lingkungan secara konsisten.

Berbagai faktor pendorong ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan memengaruhi secara simultan atau parsial. Artinya, beberapa faktor mungkin bekerja bersamaan untuk memperkuat motivasi partisipasi, sementara faktor lain mungkin lebih dominan dalam situasi tertentu atau bagi kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor pendorong yang paling dominan dalam konteks spesifik menjadi hal yang penting. Pemahaman ini memungkinkan perumusan program peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih tepat sasaran dan efektif. Misalnya, jika hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif ekonomi adalah faktor yang paling dominan mendorong partisipasi daur ulang di suatu wilayah, maka program dapat difokuskan pada penguatan sistem bank sampah atau pemberian insentif finansial lainnya. Sebaliknya, jika kesadaran lingkungan yang rendah menjadi hambatan utama, maka program edukasi dan kampanye penyadaran lingkungan harus menjadi prioritas utama.

Partisipasi yang telah berhasil diwujudkan bukanlah akhir dari upaya, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk membangun budaya partisipasi yang berkelanjutan. Memelihara konsistensi dan keberlanjutan partisipasi memerlukan strategi jangka panjang yang melibatkan penguatan kapasitas masyarakat, penyediaan dukungan yang berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi

berkala, serta adaptasi program terhadap perubahan konteks dan kebutuhan. Masyarakat. Partisipasi yang awalnya mungkin dipicu oleh faktor eksternal seperti insentif ekonomi, idealnya secara bertahap akan bertransformasi menjadi motivasi internal yang lebih kuat, seperti kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Ketika partisipasi menjadi bagian dari nilai-nilai dan norma sosial yang dianut bersama, serta terinternalisasi dalam perilaku keseharian masyarakat, maka bentuk partisipasi ini akan bertransformasi menjadi budaya yang kokoh dan berkelanjutan, menjamin keberhasilan jangka panjang program-program pembangunan dan pelestarian lingkungan.

2. Pengelolaansampah

a. Pengertian

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semipadat berupa zat organik atau anorganik. bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna. lagi dan dibuang ke lingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

- 1) Sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman
biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal
di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan

biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya.

- 2) Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar, Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Terutama penumpukan sampah yang terjadi di tempat-tempat umum seperti di pasar-pasar.

Salu et al dan Kandari (dalam Kharisah Diniyah 2025:29) menyatakan bahwa sampah merupakan sumber masalah lingkungan global terbesar saat ini sehingga menjadi perhatian serius berbagai pihak, mulai lokal, regional, dan nasional, bahkan internasional, khususnya upaya mengurangi timbulan sampah yang meningkat setiap tahunnya seiring pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan industri serta perubahan pola hidup dan kebudayaan.

Menurut Yudianto, dkk, 2019 6-8 menyatakan bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Reuse), mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat (Participation). Sampah dibatasi sejak sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis. Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan pembatasan timbunan sampah, pendaur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganannya

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah merupakan landasan hukum dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang terpadu. Peraturan ini mengatur kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah, serta menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan melakukan pembinaan. Selain itu, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membuang sampah pada tempatnya dan berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Perda ini juga memuat larangan terhadap perilaku membuang sampah sembarangan serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara efektif.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut terdapat pasal 17 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri dari:

- 1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a) Pembatasan timbunan sampah
 - b) Pendaaur ulang sampah
 - c) Pemanfaatan kembali sampah
- 2) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
 - b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.
 - c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari TPS atau TPST menuju TPA.
 - d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
 - e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

b. Jenis-jenis Sampah

Jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah dan sebagainya.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- 1) Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat *biodegradable*. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
- 2) Sampah Anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi: sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, keramik sampah detergen. Sebagian besar anorganik

tidak dapat diuraikan oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara, sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert dkk dalam Chusnul Chotimah, 2020:13).

Berdasarkan wujud atau bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah yaitu: limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa, dll. Contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum, dll. Contoh limbah gas yaitu karbon dioksida (CO_2), karbon monoksida (CO), HCl , NO_2 , SO_2 , dan lain-lain.

Dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemari tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (refuse) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Menurut Gelbert, dkk dalam Chusnul Chotimah, 2020:14 ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu:

- 1) Dampak terhadap kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

 - a) Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorrhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.

- b) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
 - c) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.
- 2) Dampak terhadap lingkungan
- Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.
- 3) Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi
- Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit).
 - b) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengetahuan adalah pengetahuan masyarakat tentang mengelola sampah, sedangkan pengalaman adalah yang pernah dialami pada masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, seperti proses pembelajaran dalam mengolah sampah pada suatu penyuluhan ataupun program pengelolaan sampah yang sudah pernah dilakukan di masyarakat.

Faktor yang berasal dari lingkungan eksternal individu berupa hubungan individu tersebut terhadap lingkungannya, dalam hal ini berupa pemerintah/masyarakat yang berperan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan sampah. Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia juga memberi pengaruh kepada persepsi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

C. Karangka Berfikir

Karangka pemikiran pada penelitian ini berkaitan dengan variabel Partisipasi Masyarakat (Variabel X1) dengan Pengelolaan Sampah (Variabel Y) dengan indikator sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat (Variabel X1)

Partisipasi Masyarakat Menurut Cohen & Uphoff yang dikutip dari Jussac

Maulana Masjhoer (2025:30) ada empat jenis partisipasi, yaitu:

- a. Pengambilan Keputusan (Decision-making)
- b. Pelaksanaan (Implementation)
- c. Manfaat (Benefits)
- d. Evaluasi (Evaluation)

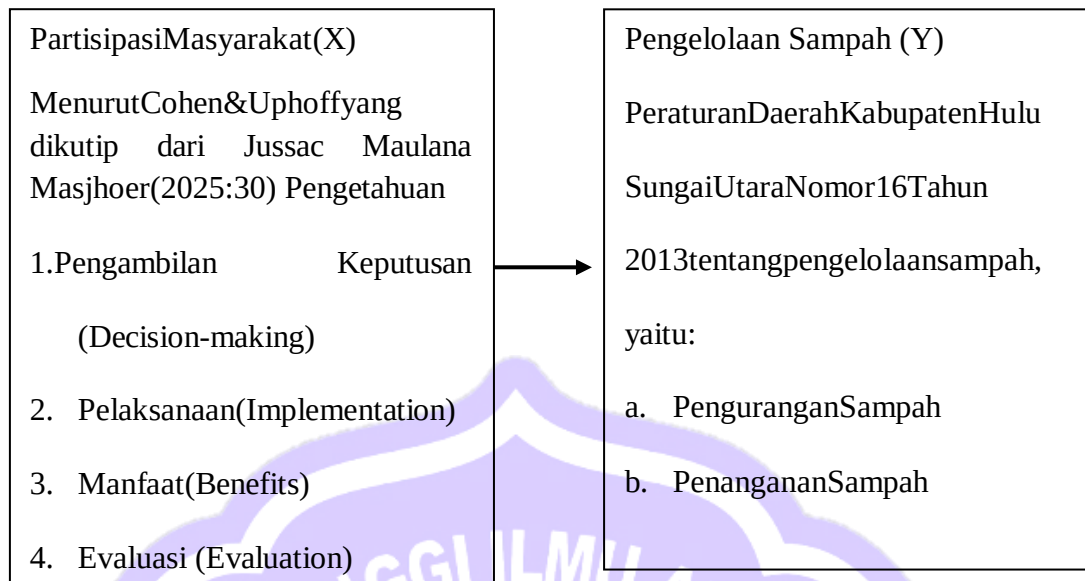
2. Pengelolaan Sampah (Variabel Y)

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Pengurangan Sampah
- b. Penanganan Sampah

Dari 2 (Dua) variabel tersebut maka akan diketahui pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Galagah Hulu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan gambaran karangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
karang kapemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka dapat ditarik hipotesis yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu:

H_a Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Desa Galagah Hulu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

H_o Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Desa Galagah Hulu Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.